

STRATEGI KOLABORATIF PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

Arya Nugraha

NPP. 32.0975

Asdaf Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: aryanugrahaarfana@gmail.com

Dosen Pembimbing : Helwani, S.Ag, M.Pd.I

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Stunting is a condition of failure to thrive in children due to chronic malnutrition and repeated infections, which impacts physical growth, intelligence, and productivity. In Indonesia, stunting is still a serious problem, especially in West Sulawesi. In Pasangkayu, stunting rates have increased despite interventions. Lack of coordination and community participation hampers handling, so cross-sector collaboration is needed. **Purpose:** This study aims to examine the collaborative strategies implemented by the Stunting Reduction Acceleration Team of Pasangkayu Regency in addressing and preventing stunting in Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach with an inductive method to deeply understand the phenomena in the field. The paradigm used helps researchers determine the focus, methods, and relevant analysis. This study analyzes the collaborative strategy of TPPS Pasangkayu Regency in accelerating stunting reduction through the Ansell and Gash theory approach. The collaboration process includes face-to-face dialogue, trust building, commitment, shared understanding and interim results. **Result/Findings:** Although the stunting rate has increased, Pasangkayu still records the lowest prevalence in West Sulawesi. Collaborative strategies in handling stunting in Pasangkayu Regency have shown good results although they cannot be said to be optimal because they still face several challenges such as budget constraints and the absence of several stakeholders. **Conclusion:** Budget optimization and innovation in villages and integrated health posts are expected to strengthen community participation in overcoming stunting problems. With the development of innovation and improvement of aspects that are not yet optimal, Pasangkayu Regency has the opportunity to achieve a more significant reduction in stunting rates in the future.

Keywords: Stunting, Collaborative Strategy, Stunting Handling

ABSTRAK

Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang berdampak pada pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas. Di Indonesia, stunting masih menjadi masalah serius, terutama di Sulawesi Barat. Di Pasangkayu, angka stunting meningkat meski intervensi dilakukan. Kurangnya koordinasi dan partisipasi masyarakat menghambat penanganan, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui bagaimana strategi kolaboratif yang dijalankan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pasangkayu dalam penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif untuk memahami secara mendalam fenomena di lapangan. Paradigma yang digunakan membantu peneliti menentukan fokus, metode, dan analisis yang relevan. Penelitian ini menganalisis strategi kolaboratif TPPS Kabupaten Pasangkayu dalam percepatan penurunan *stunting* melalui pendekatan teori Ansell dan Gash. Proses kolaborasi meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama dan hasil sementara. **Hasil/Temuan:** Meski angka *stunting* sempat naik, Pasangkayu tetap mencatat prevalensi terendah di Sulawesi Barat. Tantangan meliputi koordinasi lintas sektor, anggaran, dan partisipasi masyarakat serta beberapa peluang dalam penanganan *stunting*. Strategi kolaboratif dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu telah menunjukkan hasil baik meskipun belum dapat dikatakan optimal karena masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan anggaran dan ketidakhadiran beberapa stakeholder. **Kesimpulan:** Optimalisasi anggaran serta inovasi Desa dan posyandu diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah *stunting*. Dengan pengembangan inovasi dan perbaikan aspek yang belum optimal, Kabupaten Pasangkayu berpeluang mencapai penurunan angka *stunting* yang lebih signifikan di masa depan kesadaran beberapa pemuda yang masih rendah.

Kata Kunci: *Stunting*, Strategi Kolaboratif, Penanganan *Stunting*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar WHO, yakni lebih rendah dari -2 standar deviasi (SD) kurva pertumbuhan (*World Health Organization* 2020). Masalah ini mencerminkan ketimpangan sosial, kekurangan gizi, serta pengaruh faktor genetik dari ibu kepada anak (Khalid et al., 2022). Di Indonesia, *stunting* menjadi masalah serius karena tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas masa depan, serta pertumbuhan ekonomi (Lestari, 2023). Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan adanya tren penurunan prevalensi *stunting* nasional, dari 37,2% pada 2013 menjadi 21,6% pada 2022. Pemerintah menargetkan penurunan angka *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024 melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021. Meski demikian, beberapa daerah masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Provinsi Sulawesi Barat, misalnya, mencatat angka *stunting* sebesar 35,0% pada 2022, jauh di atas batas maksimal WHO.

Khususnya di Kabupaten Pasangkayu, angka *stunting* justru meningkat dari 25,8% pada 2022 menjadi 27,9% pada 2023. Ini menjadikan Pasangkayu sebagai satu-satunya kabupaten di Sulawesi Barat dengan tren kenaikan, meskipun Kabupaten lain mengalami penurunan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menerbitkan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2022 dan membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), yang mengadopsi pendekatan *collaborative governance*. Pendekatan ini menekankan 2

pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Strategi ini mencakup intervensi gizi spesifik (30%) oleh sektor kesehatan dan intervensi gizi sensitif (70%) oleh lintas sektor lainnya, seperti pendidikan, sanitasi, dan ekonomi. Namun, penerapan strategi ini masih menghadapi tantangan berupa minimnya koordinasi antarpemangku kepentingan, kurangnya komunikasi yang efektif, serta ketidaksamaan visi antarinstansi. Hambatan-hambatan ini menyebabkan intervensi belum berjalan optimal dan berdampak pada kenaikan angka *stunting* di Pasangkayu.

Meskipun Kabupaten Pasangkayu telah menerapkan sejumlah inisiatif intervensi untuk menghadapi *stunting*, prevalensi *stunting* justru meningkat dari 25,8% pada tahun 2022 menjadi 27,9% pada tahun 2023. Tidak adanya keterlibatan masyarakat dan sektor komersial dalam penanganan *stunting* adalah salah satu kendala utama. Pada kenyataannya, mencegah *stunting* bukan hanya tugas pemerintah. Kerja sama lintas sektor juga diperlukan untuk memastikan bahwa inisiatif saat ini berfungsi sebaik mungkin. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Kolaboratif Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Meskipun berbagai kebijakan dan program percepatan penurunan *stunting* telah diterapkan, Kabupaten Pasangkayu justru mengalami peningkatan angka *stunting* dari 25,8% pada 2022 menjadi 27,9% pada 2023. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Beberapa faktor penyebab utama antara lain lemahnya kolaborasi lintas sektor, di mana koordinasi antar instansi masih bersifat sektoral dan belum menyatu dalam satu aksi bersama. Selain itu, keterbatasan anggaran di berbagai OPD juga berdampak pada minimnya cakupan intervensi, baik dari sisi gizi spesifik maupun sensitif. Sementara itu, kondisi sosial masyarakat, seperti pola asuh yang kurang optimal dan kebiasaan hidup tidak sehat (seperti buang air di sungai), memperburuk kondisi. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membawa anak ke posyandu turut berkontribusi terhadap peningkatan angka *stunting*, karena data tidak lengkap seringkali membuat anak otomatis dikategorikan *stunting* meski kenyataannya tidak demikian.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama oleh Efa Nugroho, Puput Arisma Wanti, Cahyani Wulan Suci, Bambang Budi Raharjo, Najib (Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2023) dengan judul “*Social Determinants of Stunting in Indonesia*” menemukan bahwa determinan *stunting* adalah pendidikan ibu, pekerjaan dan pendapatan orang tua, lingkungan, dukungan sosial dan keluarga, serta faktor pelayanan kesehatan. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat hubungan antara determinan sosial kesehatan menurut orang sehat dengan peningkatan kasus *stunting* di Indonesia.

Penelitian kedua Fauziah Andika, Marniati, Nuzulul Rahmi, Chairanisa Anwar, Asmaul Husna, Faradilla Safitri (*International Journal of Science, Technology & Management*, 2021) dengan judul “*Analysis of Stunting Incidence Factors in Toddlers Aged 23-59 Months in the Work Area of the Padang Tiji Community Health Center, Pidie Regency, 2020*” menunjukkan

adanya hubungan antara kejadian stunting dengan pemberian ASI eksklusif ($P = 0,016$) ($OR = 3,071$) dan jarak kelahiran ($P = 0,043$) ($OR = 2,421$). Sementara itu, berat badan lahir ($P = 0,678$) dan penyakit infeksi ($P = 0,523$) tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Dalam hasilnya terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dan jarak kelahiran dengan kejadian stunting pada balita usia 23–59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Padang Tiji tahun 2020.

Penelitian ketiga Nurfatimah Nurfatimah, Sumiaty Sumiaty, Kadar Ramadhan, Taqwin Taqwin, I Putu Siraoka (*Journal of Public Health and Pharmacy*, 2024) dengan judul “*Analysis of Contributing Factors to Stunting in Poso Regency: A Perspective from the Special Stunting Handling Index*” menemukan bahwa Strategi analisis potong lintang dengan ukuran sampel 250 ibu dan anak-anak mereka di bawah 2 tahun, dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan pengukuran langsung untuk mengumpulkan data. Kemudian analisis univariat, uji chi-square, dan regresi logistik biner dilakukan dengan laporan akhir tentang rasio odds yang disesuaikan (AOR) dan interval kepercayaan 95% (CI). Seluruh analisis dilakukan dengan Stata versi 15. Pada hasilnya menunjukkan adanya hubungan signifikan antara *stunting* dan jenis kelamin anak, pendidikan ibu, imunisasi, dan pemberian ASI. Anak laki-laki menghadapi risiko *stunting* 2,3 kali lebih tinggi, sementara anak-anak dari ibu yang memiliki pendidikan dasar memiliki risiko 4,7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih tinggi. Anak-anak yang tidak diimunisasi dan tidak diberikan ASI juga menunjukkan risiko *stunting* yang secara signifikan lebih tinggi.

Penelitian keempat Epi Ardini, Wirman Syafri, Marja Sinurat, Layla Kurniawati, Ahmad Averus (*Jurnal Kajian Riset Multidisiplin*, 2024) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Percepatan Penanganan *Stunting* Di Provinsi Jawa Barat” bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan prevalensi *stunting* di kota Depok ini menurut implementasi kebijakan Hamdi dalam dimensi produktivitas sudah berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan pencapaian target kelompok sasaran pada tahun 2023 sebesar 2,43% dengan jumlah balita 2512 balita. Berdasarkan nilai batas untuk kesehatan masyarakat menurut WHO (2019) prevalensi balita wasting di kota Depok yaitu 2,43% dan ini termasuk kategori sangat rendah. Hasil tersebut telah melebihi dari target RJPMD kota Depok 2024 sebesar 7%. Kemudian dari dimensi linieritas yang dilihat dari prosedur, waktu, biaya, tempat dan para petugas pelaksana program penurunan *stunting* di kota Depok telah sesuai, begitupun dengan dimensi efisiensi implementasi kebijakan penurunan *stunting* di kota Depok yang dilihat dari asset, dana dan teknologi telah sesuai dengan Perwali kota Depok No.99 tentang percepatan penurunan *stunting* di kota Depok.

Penelitian kelima Zulkarnaen, Nining Indroyono Soesilo (*Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 2021) dengan judul “Determinan Dan Kebijakan Penanganan *Stunting* Di Indonesia” menunjukkan bahwa DAK bidang kesehatan tidak berdampak terhadap peningkatan banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD. Sementara, banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD berdampak terhadap penurunan *stunting* secara signifikan.

Penelitian keenam Imam Pasli (*Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 2024) yang berjudul “Tren Global dan Lokal dalam Penurunan *Stunting*: Analisis Bibliometrik dari Studi Terpilih” menunjukkan bahwa pengelolaan *stunting* yang efektif memerlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan kesehatan, gizi, sanitasi, dan pendidikan.

Penelitian ketujuh Muhammad Adib Putra Budiman (*Journal Governance*, 2024) yang berjudul “*Collaborative governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kota Palembang” menemukan bahwa terdapat hambatan dalam upaya menciptakan kolaborasi yang efektif. Perbedaan pemahaman dan prioritas antar pemangku kepentingan menjadi salah satu hambatan utama. Setiap pihak memiliki perspektif dan fokus yang berbeda terhadap isu *Stunting*, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan dan tujuan bersama. Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang kurang optimal juga menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Koordinasi yang lemah antara dinas-dinas terkait di tingkat pemerintah daerah dapat mengurangi efektivitas program-program penurunan *Stunting*.

Penelitian kedelapan Dewi Febriyanti, Dadan Kurnia, Dahly Sukmapryandhika (*Jurnal Praxis Idealis*, 2025) yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Penanganan *Stunting* Di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi” menemukan bahwa beberapa tantangan dalam dimensi *collaborative governance*. Pada dimensi *face-to-face dialogue*, penyuluhan hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat. Dalam *trust building*, belum ada jaminan keberlanjutan bantuan makanan bergizi setelah program selesai. Pada *commitment to process*, partisipasi masyarakat dengan kesadaran gizi rendah masih terbatas. Dalam *shared understanding*, beban kerja tinggi dan kurangnya pemahaman bersama mengurangi efektivitas kolaborasi. Sementara itu, *intermediate outcomes* menunjukkan bahwa intervensi *stunting* memerlukan waktu panjang untuk melihat hasil.

Penelitian kesembilan Nurmadina Jamhur (*jurnal Universitas Hasanuddin*, 2024) yang berjudul “*Collaborative Dynamics* Dalam Penanganan *Stunting* Melalui Program Ma’silambi Di Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar” menemukan bahwa strategi melalui Program Ma’silambi di Desa Duampanua yang terdiri dari ketiga indikator *Collaborative Dynamics* yang dilakukan dinilai masih kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan *principled engagement*, *shared motivation* dan *capacity for joint action* dalam kolaborasi masih perlu diperbaiki karena memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya monitoring oleh pemerintah, kurangnya komitmen masing-masing aktor dalam berkolaborasi, dan kurangnya kapabilitas dari pelaksana serta tidak adanya aturan khusus dari Program Ma’silambi..

Penelitian kesepuluh Agung Muhammad Siradj, Sudarmono (*Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 2024) yang berjudul “*Collaborative Governance In Addressing Stunting In The Bajau Community In Buton Regency*” menemukan bahwa keadaan terisolasi masyarakat Bajo/Bajau sejak lama di atas laut sehingga memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat etnis lain di Buton.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni strategi kolaboratif Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pasangkayu dalam penanganan dan pencegahan *stunting* yang tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi kolaboratif yang dijalankan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pasangkayu dalam penanganan dan

pencegahan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rumusan masalah yang disajikan dalam metode deskriptif. Dalam tipe ini menjelaskan bahwa peneliti menganalisa secara mendalam dengan melihat keterkaitan antara teori dan fenomena masyarakat. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab Pasangkayu, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab Pasangkayu, Penata Kependudukan dan Keluarga Dinas P2KBP3A Kab Pasangkayu, kepala Dinas, Analis Perekonomian Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Bappeda Kab Pasangkayu dan Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas PUPR Kab Pasangkayu.

Metode kualitatif deskriptif dipilih karena dapat menyajikan pemahaman yang mendalam serta menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Menurut Simangunsong (2017:190), pendekatan kualitatif memiliki sifat yang lentur dan adaptif terhadap situasi lapangan yang dinamis, termasuk adanya perubahan informasi atau fenomena yang muncul selama proses pengumpulan data. Karena alasan tersebut, penelitian ini menggunakan metode ini agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi atau informasi baru yang mungkin muncul selama pelaksanaan penelitian terkait dengan strategi kolaboratif dalam penanganan *stunting* oleh tim percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Pasangkayu. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti berperan sebagai alat utama dalam proses pengumpulan dan analisis data, yang dilakukan melalui wawancara, observasi, serta penelaahan dokumen, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Nurdin dan Hartati (2019:42), yang menyatakan bahwa dalam pendekatan kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang memungkinkan eksplorasi data secara mendalam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan wawancara observasi dan dokumentasi mengenai strategi kolaboratif dalam penanganan *stunting* oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pasangkayu menggunakan teori dari Ansell and Gash (2007) yang menyatakan bahwa *Collaborative governance* terdiri dari 4 dimensi yakni dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi

3.1. Kondisi Awal

Sesuai dengan kosep yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, kondisi awal dapat menggambarkan keadaan awal tiap sektor sebelum adanya kolaborasi yang dijalankan dalam penanganan *stunting* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Sebelum adanya kebijakan nasional melalui Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang mendorong pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), masing-masing OPD di Kabupaten Pasangkayu telah menjalankan program-program sektoral secara mandiri. Dinas Kesehatan, misalnya, telah melaksanakan berbagai kegiatan rutin seperti pemeriksaan ibu hamil, pemberian susu, penimbangan balita, serta promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Namun, seperti dijelaskan oleh Bapak

Sapriadi dari Bappeda, kegiatan ini belum dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Hj. Jymarni dari Dinas Kesehatan yang mengungkapkan bahwa capaian partisipasi masyarakat ke posyandu sebelum adanya kolaborasi hanya sekitar 50%, dan baru meningkat signifikan hingga 85% setelah adanya TPPS.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) juga telah berkontribusi dalam aspek pemenuhan gizi keluarga penerima manfaat (KPM), namun koordinasi dengan OPD lain baru terjadi setelah masuknya dinas ini dalam struktur TPPS. Ibu Armawati Azis dari Dinas Sosial menyebut bahwa setelah tergabung dalam TPPS, pendekatan terhadap KPM menjadi lebih terarah, terutama dalam memastikan bantuan sembako berkontribusi langsung terhadap peningkatan gizi.

Sementara itu, Dinas PUPR yang menangani sanitasi dan air bersih pada awalnya belum sepenuhnya menyadari keterkaitannya dengan isu *stunting*. Ibu Rahmania dari Dinas PUPR mengakui bahwa setelah adanya TPPS, Dinas PU menjadi lebih sadar akan dampak programnya terhadap keluarga berisiko *stunting*, sehingga mulai memprioritaskan pembangunan infrastruktur di desa-desa dengan risiko tinggi.

Disisi lain, Dinas P2KBP3A, melalui program Keluarga Berencana, juga telah menjalankan kegiatan penyuluhan kepada pasangan usia subur terkait penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran. Ibu Andi Dewi Sartika menyatakan bahwa kegiatan ini sebenarnya sudah berkontribusi pada pencegahan *stunting* sebelum TPPS dibentuk, meskipun pada masa itu belum terintegrasi dalam strategi lintas sektor.

Secara keseluruhan, kondisi awal penanganan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu ditandai dengan adanya program-program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri, belum saling terhubung secara strategis. Pembentukan TPPS sebagai bentuk strategi kolaboratif lintas sektor menjadi titik balik penting dalam mengintegrasikan upaya yang tersebar agar lebih efektif dalam menurunkan angka *stunting* secara bersama-sama.

3.2. Desain Kelembagaan

Dalam konteks teori Ansell dan Gash, “Desain Kelembagaan” merujuk pada kejelasan regulasi yang ada sebagai dasar pembentukan komitmen kerja sama dalam menghadapi suatu masalah atau situasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini memuat mengenai regulasi terkait penanganan *Stunting*.

Desain kelembagaan menjadi langkah awal penting dalam membangun kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam penanganan *stunting*. Aspek utama yang ditekankan adalah kejelasan aturan, partisipasi semua pihak, serta transparansi dalam proses. Seperti yang ditegaskan oleh Ansell dan Gash (2007), aturan yang terbuka dan adil akan membangun kepercayaan antarpihak bahwa kerja sama dijalankan demi kepentingan bersama.

Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional, seperti Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki status gizi masyarakat secara terencana dan terkoordinasi, khususnya dalam periode seribu hari pertama kehidupan. Lebih lanjut, komitmen ini diperkuat melalui terbitnya Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Strategi Nasional Penurunan *Stunting*. Kebijakan ini memperkuat peran kelembagaan dan intervensi

terpadu, serta mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam upaya percepatan penurunan angka *stunting*.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kabupaten Pasangkayu juga menetapkan regulasi daerah untuk mendukung struktur kelembagaan penanganan *stunting*. Peraturan Bupati Pasangkayu No. 20 Tahun 2022 menjadi dasar penting dalam mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk terlibat aktif, baik dalam perbaikan gizi, edukasi kesehatan, perilaku hidup bersih, hingga peningkatan kualitas lingkungan. Selain itu, untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, diterbitkan pula Surat Keputusan Bupati Pasangkayu No. 105 Tahun 2023 yang menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) hingga ke tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sapriadi, S.I.P, Analis Perekonomian Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Bappeda Kabupaten Pasangkayu, dijelaskan bahwa keluarnya Perpres No. 72 Tahun 2021 menjadi tonggak penting terbentuknya TPPS di berbagai tingkat pemerintahan. Pasal 18 dalam peraturan tersebut secara khusus mengatur struktur keanggotaan TPPS, yang kemudian ditindaklanjuti di tingkat daerah melalui Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2022. Dengan dasar hukum yang jelas dan struktur koordinasi yang kuat, pelaksanaan kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Pasangkayu menjadi lebih terarah dan efektif dalam menekan angka *stunting*.

Dengan demikian, kejelasan desain kelembagaan melalui regulasi nasional hingga daerah tidak hanya menjadi acuan legal, tetapi juga memperkuat koordinasi antar sektor dan meningkatkan kepercayaan publik bahwa upaya penanganan *stunting* dijalankan secara terbuka, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

3.3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam mendorong kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam penanganan *stunting*. Pemimpin yang efektif mampu membangun kepercayaan, mendengar berbagai pandangan, mendorong diskusi terbuka, dan memastikan semua pihak merasa diuntungkan. Kepemimpinan semacam ini juga sangat penting dalam mengelola konflik dan mengurangi sikap ego sektoral yang sering muncul pada awal pelaksanaan kerja sama.

Dalam konteks Kabupaten Pasangkayu, Dinas P2KBP3A berperan sebagai pemimpin fasilitatif sekaligus sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Dinas ini tidak hanya menjadi penghubung antarsektor, tetapi juga aktif dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan aksi konvergensi mulai dari Aksi 1 hingga Aksi 8 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sapriadi, S.I.P dari Bappeda, Dinas P2KBP3A secara rutin berkoordinasi dengan lintas sektor sebelum pelaksanaan aksi, terutama dengan Bappeda Litbang sebagai mitra strategis.

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas P2KBP3A juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ibu Armawati Azis, SE.,M.A.P dari Dinas Sosial menyatakan bahwa Dinas KB sangat aktif menggunakan media WhatsApp, baik melalui grup maupun pesan pribadi, untuk mengundang dan mengingatkan setiap sektor mengenai jadwal rapat TPPS. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas P2KBP3A dalam menjaga komunikasi lintas sektor tetap

berjalan dengan baik. Lebih dari itu, Dinas P2KBP3A juga menjalankan pendekatan langsung kepada masyarakat, seperti melalui kegiatan rembug *stunting* di setiap kecamatan. Menurut Ibu Hj. Jymarni, SKM dari Dinas Kesehatan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan balita dan pentingnya peran serta mereka dalam upaya penurunan *stunting*. Dukungan terhadap kepemimpinan Dinas P2KBP3A juga datang dari Dinas PUPR. Ibu Rahmania menyampaikan bahwa selain aktif memimpin rapat, Dinas P2KBP3A juga langsung turun ke lapangan untuk mendata keluarga kurang mampu yang berisiko *stunting*, serta menjaga komunikasi dengan sektor lain melalui surat dan pesan digital.

Dengan demikian, Dinas P2KBP3A Kabupaten Pasangkayu menunjukkan bentuk kepemimpinan fasilitatif yang efektif, tidak hanya dalam mengelola koordinasi teknis, tetapi juga dalam membangun kepercayaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjaga arah kerja sama tetap terfokus pada tujuan bersama, yaitu menurunkan angka *stunting* secara berkelanjutan.

3.4. Proses Kolaborasi

Penelitian ini mengkaji proses kolaborasi sebagai strategi utama yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, khususnya oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), dalam upaya menanggulangi masalah *stunting*. Proses kolaboratif ini dimulai melalui dialog tatap muka, yang menjadi titik awal terbentuknya kepercayaan antar pemangku kepentingan. Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa pertemuan rutin lintas sektor dilakukan secara terstruktur oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) selaku koordinator lapangan. Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka mendukung delapan Aksi Konvergensi, terutama pada Aksi 1 sampai Aksi 3 yang menjadi fokus utama dalam tahap awal penanganan *stunting*.

Melalui kegiatan koordinasi tersebut, terbentuk kepercayaan antar stakeholder, yang diperkuat dengan adanya sistem pelaporan berkala melalui aplikasi Bangda dari Kemendagri. Setiap stakeholder bertanggung jawab mengunggah laporan progres masing-masing aksi ke dalam platform tersebut, dengan verifikasi oleh Bappeda sebagai administrator. Transparansi ini menjadi wujud nyata dari akuntabilitas kinerja dan memperkuat kolaborasi antar instansi.

Komitmen terhadap proses kolaborasi juga dibuktikan melalui dokumen resmi berupa Surat Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor 105 Tahun 2023, yang menetapkan struktur dan tanggung jawab TPPS. Forum koordinatif yang diadakan secara berkala menjadi wadah untuk meneguhkan kesepakatan dan peran antar instansi, meskipun masih terdapat peluang untuk memperluas partisipasi termasuk dari sektor swasta.

Seiring waktu, terjadi peningkatan dalam pemahaman bersama antar pemangku kepentingan mengenai pentingnya isu *stunting*. Intensitas pertemuan dan interaksi dalam forum rapat telah mendorong keterbukaan komunikasi dan kemudahan akses data antar dinas. Hal ini memungkinkan percepatan respons terhadap kebutuhan teknis seperti pengusulan anggaran atau pelaksanaan program intervensi. Stakeholder mulai menyadari bahwa penanganan *stunting* bukan hanya tugas sektoral, melainkan tanggung jawab bersama yang mendesak.

Secara umum, hasil sementara dari kolaborasi ini menunjukkan progres yang positif,

meskipun tidak tanpa tantangan. Kabupaten Pasangkayu tetap mencatat prevalensi *stunting* terendah di Provinsi Sulawesi Barat, meskipun sempat mengalami peningkatan sebesar 2% pada tahun 2023. Kenaikan ini dijelaskan oleh perubahan metode survei dari SSGI ke SKI, yang menggunakan sampel berbeda dan dinilai kurang merepresentasikan upaya lapangan secara menyeluruh. Meskipun demikian, pelaksanaan program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di desa dan puskesmas membuktikan bahwa kerja sama lintas sektor tetap berjalan optimal.

Dengan dasar teori kolaborasi dari Ansell dan Gash, penelitian ini menyimpulkan bahwa dialog tatap muka, kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama menjadi pilar penting dalam strategi kolaboratif TPPS Kabupaten Pasangkayu. Meskipun belum sepenuhnya maksimal, strategi ini telah menunjukkan potensi besar dalam menanggulangi *stunting* secara berkelanjutan dan terstruktur di tingkat daerah.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan Strategi Kolaboratif oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pasangkayu masih berjalan kurang optimal. Penyebab paling mendasar yaitu Mengenai anggaran, anggaran yang digunakan dalam proses kolaborasi terhadap penanganan *stunting* masih dapat dikatakan jauh dari kebutuhan. Sehingga dalam melaksanakan program tiap sektor masih memiliki banyak hambatan, misalnya dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi di tahun 2023 itu hanya wajib melaksanakan 4 dari 8 aksi diakibatkan keterbatasan anggaran yang tertaja dalam juknis tahun 2023 tersebut. Selain itu banyak inovasi yang disampaikan oleh beberapa sektor seperti Dinas Sosial yang belum bisa terealisasikan akibat dari kurangnya anggaran yang tersedia. Kondisi serta kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri bagi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pasangkayu dalam menghadapi hal tersebut. Beberapa orang tua yang belum sadar akan kewajiban dalam mengasuh anak terlebih yang masih dalam perkembangan kebutuhan gizi serta pentingnya untuk dibawa ke posyandu saat jadwal terbuka masih sangatlah kurang. Beberapa hambatan yang terjadi mengakibatkan Kolaboratif dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* belum terealisasikan secara optimal.

Berbeda dengan temuan yang dicapai oleh Ghiffari Faizi Ramadhan, Lina Ariani, Karien Febriantini mengenai *Collaborative governance in Handling Stunting: Success Study in Gintungkerta Village, Karawang Regency* yang menemukan bahwa kondisi awal yang memadai disertai desain kelembagaan dan komitmen serta pemahaman yang dibagi di antara para pemangku kepentingan kuat namun di satu sisi dukungan DPPKB masih belum optimal. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dukungan fasilitatif dan mediasi yang dijalankan oleh dinas P2KBP3A sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan koordinasi antar dinas yang berjalan dengan baik namun disisi lain dukungan serta pemahaman masyarakat yang masih kurang akan kepentingan dalam penanganan pencegahan *stunting*.

Namun, temuan ini juga berbeda dengan hasil penelitian oleh Muhammad Adib Putra Budiman (2024) mengenai *Collaborative governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kota Palembang yang menemukan bahwa perbedaan pemahaman dan prioritas antar pemangku kepentingan menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang kurang optimal juga menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Hasil

penelitian ini memperlihatkan bahwa koordinasi yang diperoleh dari kerja sama setiap tahunnya antar *stakeholders* di Kabupaten Pasangkayu terus terjalin dengan baik seiring berjalannya waktu diakibatkan pemahaman yang sama dalam bekerja sama terhadap penanganan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu.

Selanjutnya, temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Sri Rahayu, Abdul Mahsyar, Fatmawati (2024) mengenai strategi kolaborasi pencegahan *stunting* di Kabupaten Bantaeng dilakukan dengan membentuk ruang diskusi untuk mengidentifikasi masalah agar para pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting* dan tidak ada kepentingan individu dalam kolaborasi yang dilakukan, yang menyoroti bahwa dialog tatap muka sangat berperan penting dalam membentuk pemahaman bersama bagi setiap pemangku kepentingan serta menyampingkan kepentingan individu dan berfokus dalam bekerja sama dalam penanganan dan pencegahan *stunting*.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan terkait dengan *Collaborative governance* yang dijalankan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pasangkayu dapat dikatakan setiap tahunnya menjadi lebih baik, hal itu dibuktikan dengan bentuk kepercayaan antar *stakeholders* yang semakin kuat dengan seringnya diadakan rapat aksi konvergensi dalam membangun komitmen serta pemahaman bersama terkait penanganan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu.

Dalam penerapan strategi kolaboratif terhadap percepatan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Pasangkayu masih terdapat berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh terutama terkait keterbatasan anggaran yang dapat dikatakan sebagai tantangan terbesar dalam menerapkan strategi kolaboratif. Walaupun didukung dengan peluang seperti Inovasi Desa dan Posyandu guna mendukung partisipasi masyarakat, namun keterbatasan anggaran masih menjadi masalah tersendiri terkhusus pada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dalam penerapan strategi kolaboratif.

Pada penerapan proses kolaborasi yang sudah berjalan baik antar *stakeholder* terkait penanganan *stunting*, namun ditinjau dengan adanya tantangan dan hambatan yang terjadi dilapangan sehingga pada tahun 2023 Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan angka dibandingkan tahun sebelumnya. Maka dapat dikatakan strategi kolaboratif yang diterapkan oleh Tim Percepatan penurunan *Stunting* Kabupaten Pasangkayu masih belum optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni kesadaran masyarakat yang masih rendah yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, sanitasi yang buruk, dan kurangnya anggaran yang tersedia.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Strategi Kolaboratif Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh sektor yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pasangkayu yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan

pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andika, F. (2021). The Analysis of Stunting Incidence Factors in Toddlers Aged 23-59 Months in the Work Area of the Padang Tiji Community Health Center, Pidie Regency, 2020. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(3), 642-649. Retrieved from <https://ijstm.inarah.co.id/index.php/ijstm/article/view/200>
- Ardini, E., Syafri, W., Sinurat, M., Kurniawati, L., & Averus, A. (2024). Implementasi Kebijakan Percepatan Penanganan *Stunting* Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Riset Multidisiplin*, 8(2). Retrieved from <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkrm/article/view/3893>
- Budiman, M. A. P., & Sinaga, J. B. B. (2024). *Collaborative governance* Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kota Palembang (Doctoral dissertation, IPDN). Retrieved from <http://eprints.ipdn.ac.id/19533/>
- Febriyanti, D., Kurnia, D., & Sukmapryandhika, D. (2025). *Collaborative Governance* Dalam Penanganan *Stunting* Di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1). Retrieved from <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/praxis/article/view/3251>
- Jamhur, N. (2024). Collaborative Dynamics dalam Penanganan *Stunting* Melalui Program Ma'silambi Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar= Collaborative Dynamics in Handling *Stunting* Through the Ma'silambi Program in Duampanua Village, Polewali Mandar Regency (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Retrieved from <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/34857/>
- Khalid, S. H., Patimah, S., & Asrina, A. (2022). Persepsi Masyarakat mengenai Penyebab dan Dampak *Stunting* di Kabupaten Majene Sulawesi Barat Tahun 2020. *Journal of Muslim Community Health*, 3(4), 80-94.
- Lestari, T. R. (2023). *Stunting* Di Indonesia: Akar Masalah dan Solusinya. *Info Singkat Kaji Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategi*, 15(14), 21-25.
- Nugroho, E., Wanti, P. A., Suci, C. W., Raharjo, B. B., & Najib, N. (2023). Social determinants of stunting in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(4), 546-555. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/kemas/article/view/40875>
- Nurdin, M., & Hartati, N. (2019). Pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial dan kebijakan. Penerbit Universitas Terbuka.
- Nurfatimah, N., Sumiaty, S., Ramadhan, K., Taqwin, T., & Suraoka, I. P. (2024). Analysis of Contributing Factors to *Stunting* in Poso Regency: A Perspective from the Special *Stunting* Handling Index. *Journal of Public Health and Pharmacy*, 4(3), 205-213. Retrieved from <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jphp/article/view/4813>
- Pasli, I. (2024). Tren Global dan Lokal dalam Penurunan *Stunting*: Analisis Bibliometrik dari Studi Terpilih. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 249-261. Retrieved from <https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i2>
- Simangunsong, R. (2017). Fleksibilitas metode kualitatif dalam penelitian sosial dan kebijakan. Bandung: Alfabeta. Retrieved from http://eprints.ipdn.ac.id/22887/1/32.0318_Yongki%20Apriadi%20Putra_Reposito

ri.pdf

- Siradj, A., & Sudarmono, S. (2024). Collaborative Governance In Addressing *Stunting* In The Bajau Community In Buton Regency. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(1), 66-84. <https://doi.org/10.33701/jkp.v7i1.4364>
- World Health Organization. 2013. "Program Pencegahan *Stunting* Di Indonesia: A Systematic Review." *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal)* .17(3): 281–292.
- Zulkarnaen, Z., & Soesilo, N. I. (2021). Determinan dan Kebijakan Penanganan *Stunting* di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 14(1), 94-110. Retrieved from <https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i1.1497>

